16

PEMBANGUNAN HUTAN BUATAN
(Hutan Tanaman Industri)

Dudung Darusman
(Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Lektor Kepala Madya Ekonomi Sumberdaya Hutan)

Makalah Utama disampaikan pada
Seminar Sehari Pemanfaatan Hutan yang Berkelanjutan
Departemen Kehutanan, Jakarta 11 Juni 1991

PENDAHULUAN

Uraian tentang pentingnya pembangunan hutan buatan, yang selanjutnya disebut juga pembangunan HTI karena lebih populer, sudah banyak dan cukup lengkap dikemukakan oleh berbagai pihak pada berbagai kesempatan.

Sekedar untuk mengingatkan saja, pentingnya HTI dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Penurunan kapasitas produksi hutan alam dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi hutan buatan dalam rangka mempertahankan peranan sektor kehutanan (dan juga profesi kehutanan) dalam pembangunan nasional.
2. Penurunan *supply* bahan baku industri perkayuan dari hutan alam perlu diatasi dengan peningkatan *supply* dari hutan buatan HTI dalam rangka mempertahankan pertumbuhan industri kehutanan yang sangat besar peranannya bagi pembangunan sosial-ekonomi nasional.
3. Penurunan kapasitas pemeliharaan lingkungan hidup dari hutan alam perlu diimbangi dengan peningkatan peranan dari hutan buatan HTI.

Masih banyak lagi alasan-alasan rasional lain tentang perlunya HTI segera dibangun, namun bukan saatnya dikemukakan lagi pada makalah ini. Namun ada yang perlu diingatkan disini, bahwa tidak ada satu pernyataan pun yang mengemukakan bahwa HTI lebih baik dari Hutan Alam secara keseluruhan. HTI diprioritaskan karena dianggap lebih dikuasai segi manajemennya, lebih *predictable* dari segi usaha, dan lebih intensif dari segi ekonomi dalam arti bahwa pada sumberdaya alam yang kecil dapat diciptakan volume ekonomi yang besar.

AKANKAH PEMBANGUNAN HTI BERKELANJUTAN

Apabila pembangunan HTI dapat berkelanjutan maka profesi kehutanan akan berkelanjutan, sektor kehutanan dan industri kehutanan akan berkelanjutan, serta lingkungan hidup dan kehidupan pun akan berkelanjutan. Pertanyaannya adalah akankah HTI berkelanjutan, bahkan akankah program pembangunan HTI berhasil dan segera berlari mengejar permasalahan yang terus bertambah di hadapan kita ?

Untuk itu perlu ditelaah secara seksama beberapa aspek teknis, ekonomis dan politik yang terkait, khususnya di bidang kehutanan. Beberapa diantaranya dapat diuraikan secara bertahap sebagai berikut :

1. Penguasaan teknologi penanaman dan pemeliharaan hutan dari para calon pengusaha HTI pada umumnya masih rendah. Teknologi yang telah mereka kuasai umumnya adalah pemanenan atau eksploitasi hutan. Teknologi penanaman dan pemeliharaan hutan sesungguhnya sudah tersedia dan telah dididikkan kepada para sarjana, sarjana muda, diploma dan lulusan SMTA Kehutanan. Tinggallah para pengusaha HTI memanfaatkannya sebagai tenaga kerja bagi usaha mereka. Dorongan pemerintah kepada pihak swasta kehutanan untuk mempekerjakan para lulusan kehutanan tersebut telah dan akan terus mendorong penguasaan teknologi oleh pengusaha HTI dimasa yang akan datang.

2. Tingkat teknologi penanaman dan pemeliharaan HTI yang ada sekarang masih harus dikembangkan lagi agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan keragaman permasalah teknis di lapangan. Kesadaran dan upaya para peneliti kehutanan, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian sendiri tampak semakin meningkat; walaupun dengan dukungan yang belum memadai dari pemerintah dan para pengusaha sebagai calon pemakai temuan teknologi tersebut. Dukungan anggaran penelitian kehutanan yang jauh di bawah angka 1 % dari *gross value* sektor kehutanan sungguh mengkhawatirkan, karena tiada rumusan teknologi yang berlaku umum dan sepanjang masa; dan hanya dengan kemajuan penguasaan teknologi setiap upaya buatan manusia dapat berkelanjutan; atau dapat mengamankan investasi awal yang mungkin sangat besar.

3. Secara ekonomi dan finansial, usaha HTI pada waktu yang lalu dirasakan kurang menarik para investor/pengusaha karena rentabilitasnya (BCR, NPV, dan IRR) relatif rendah dibanding usaha lainnya. Bagi para pengusaha kehutanan dan pemerintah alternatif hutan alam jauh lebih menarik.

   Apabila hal ini terus dibiarkan maka dapat terjadi apa yang disebut "*dutch diseases*" yakni melemahnya sektor-sektor produksi secara keseluruhan akibat terlalu kuatnya sektor produksi tertentu, sementara itu sektor produksi yang kuat tersebut cenderung melemah efisiensinya karena terjadi *over investasi*. Hanya dengan kebijaksanaan yang berani dari Pemerintah Belanda, maka ekonomi negaranya segera terhindar dari jebakan kehancuran. Hal ini kemudian terjadi beberapa waktu di Kuwait, sehingga disebut *Kuwait effect* yang pada prinsipnya adalah sama.

   Keberanian Pemerintah memberi dana pinjaman dengan bunga 0 % serta standar biaya penanaman yang tinggi bagi HTI merupakan hal yang dapat mengatasi *diseases* di atas sehingga pembangunan HTI dapat segera terwujud dan berkelanjutan. Dikatakan dapat mengatasi karena : (1) memang masih sangat tergantung pada tingkat kekritisan pemahaman dari para calon pengusaha HTI sendiri, dan (2) masih diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain dari pemerintah, yang menunjang.

4. Usaha HTI memerlukan waktu yang relatif panjang dibandingkan dengan usaha eksploitasi hutan alam (HPH). Pada prakteknya di lapangan pengusaha HPH dapat menghitung kurun waktu investasi secara tahunan, sementara HTI dengan daur yang terpendek pun masih di atas 5 tahun. Hal ini berarti bahwa bagi usaha HTI diperlukan kebijaksanaan perlindungan dari pemerintah secara khusus, sehingga terdapat kepastian usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini dapat ditelaah lebih lanjut beberapa hal berikut :

   a. Kestabilan politik sebagai prasyarat bagi kestabilan ekonomi, secara umum di Indonesia sudah cukup kuat dan sudah terumuskan secara jelas. Namun demikian, kestabilan ekonomi yang menjamin kestabilan usaha dalam beberapa hal masih harus diusahakan pemerintah. Misalnya jangan sampai terjadi usaha HTI sedang berjalan kemudian diperuntukkan bagi usaha lain,

      Penetapan waktu usaha HTI selama satu daur ± 35 tahun secara umum sangat baik karena dapat memberikan kepastian usaha dan harapan peningkatan produktivitasnya. Tampaknya pemerintah telah mampu mengubah kebijaksanaan kelembagaan (waktu usaha) tersebut yang berbeda dengan waktu usaha HPH, yang oleh para ahli dipercayai sebagai sumber permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan hutan alam.

   b. walaupun sudah tidak banyak dibicarakan, *high cost economy* di Indonesia pada waktu-waktu yang lalu masih terjadi, yang diakibatkan baik oleh hal-hal yang bersifat struktural maupun fungsional. Dalam rangka perlindungan khusus dari pemerintah terhadap usaha HTI, maka segala bentuk penyebab *high cost economy* terhadap HTI harus dikurangi/ditiadakan. Penekanan atau peniadaan pos *biaya pergaulan* yang masih seringkali tercantum sekitar 30 % akan sangat membantu kelancaran dan kelanjutan usaha HTI dimasa yang akan datang.

   c. Hal yang seringkali dilupakan adalah tingkat kekritisan pemahaman pengusaha terhadap peluang-peluang usaha dan perhitungan ekonomi di bidang kehutanan, termasuk di bidang usaha HTI. Seringkali masih dirasakan bahwa pengusaha kehutanan di Indonesia agak lambat menangkap rangsangan/insentif dari pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi sejak awal karena usaha kehutanan sesungguhnya mempunyai perhitungan ekonomi yang khas dan lebih kompleks. Namun demikian secara relatif sudah mengalami banyak perubahan dan kemajuan.

Dari uraian telahaan aspek-aspek tersebut di atas dapat dilihat upaya-upaya apa yang masih perlu dilakukan dan dikembangkan agar pembangunan HTI berhasil serta dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KEDUDUKAN STRATEGIS KEHUTANAN DALAM KEMAJUAN BANGSA INDONESIA DI MASA YANG AKAN DATANG

Pada kesempatan ini perlu dikemukakan pentingnya pemahaman bersama dari seluruh pihak yang terlibat, tentang kedudukan kehutanan dalam kemajuan Bangsa

Indonesia dimasa yang akan datang. Kehutanan yang dimaksud adalah termasuk pengelolaan proses produksi hutan alam dan hutan buatan (HTI).

Apabila setiap proses produksi selalu memerlukan : bahan baku, teknologi dan modal, tenaga kerja dan keterampilan manajemen; maka satu-satunya yang paling unggul yang kita miliki dalam percaturan persaingan globalisasi ekonomi adalah bahan baku. Kalaupun ada input-input lainnya pun kita semakin maju, namun harus disadari bahwa masih jauh untuk dapat dikatakan unggul. Sedangkan pada bahan baku sudah jelas-jelas unggul dan hal ini harus dipelihara dan dipertahankan terus agar Bangsa Indonesia memiliki kekuatan memimpin secara politik dan ekonomi dimasa yang akan datang. Dengan mudah dapat dilihat bagaimana relatif kuatnya peranan OPEC di bidang energi dunia.

Pembangunan sumberdaya hutan, termasuk HTI, tidak hanya perlu dilihat sebagai usaha ekonomi finansial tapi harus disadari bersama sebagai usaha strategis bagi kehadiran dan kemajuan Bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Bukannya tidak mungkin, berbagai kekuatan ekonomi dibeberapa negara maju menaruh kekhawatiran terhadap keberhasilan upaya Bangsa Indonesia di bidang pembangunan sumberdaya hutan ini.

PERANAN PIONEER DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Adalah langkah-langkah yang baik apabila Pemerintah terus mendorong pihak-pihak swasta untuk perpartisipasi aktif dalam pembangunan HTI dan pembangunan sektor kehutanan secara umum. Namun mengingat pentingnya nilai strategis sumberdaya hutan bagi Bangsa Indonesia dimasa yang akan datang seperti diuraikan di atas, kita tidak dapat menunggu terlalu lama kesadaran dan partisipasi swasta atau bahkan kita tidak dapat memberi insentif-insentif baru lagi yang dapat dianggap melewati batas-batas minimal efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Untuk itu kiranya tepat untuk segera diambil langkah besar dalam pembangunan HTI yang dilaksanakan oleh BUMN, sambil tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta. Walaupun beberapa pengamat ekonomi berpendapat bahwa BUMN cenderung secara ekonomi mikro kurang efisien, tapi secara makro dan dalam hal-hal sosial-politik BUMN memiliki kelebihan-kelebihan bagi kepentingan pembangunan nasional.

PENUTUP

Demikianlah hal-hal yang dapat dikemukakan sekitar pembangunan hutan buatan agar dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara ringkasnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hutan buatan (HTI) di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi penanaman dan pemeliharaan dari para pengusaha dan calon pengusaha HTI.
2. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan HTI pada keadaan lapangan yang sangat beragam.

3. Pemantapan kebijaksanaan insentif permodalan dari Pemerintah bagi para pengusaha HTI.
4. Kestabilan ekonomi dan kestabilan dunia usaha.
5. Penghindaran *high cost economy.*
6. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang peluang-peluang usaha dan peranan pembangunan sumberdaya hutan dari semua pihak yang terlibat, khususnya para pengusaha HTI.

Tentunya masih ada aspek-aspek lain yang mungkin masih perlu diperhatikan dalam pembangunan HTI di Indonesia, yang karena di luar penguasaan penulis, tidak dapat dikemukakan pada makalah ini.